



KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS FASILITAS INVESTASI DALAM STUDI KOMPARATIF PERATURAN INSENTIF INVESTASI ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM

LEGAL CERTAINTY AND EFFECTIVENESS OF INVESTMENT FACILITIES IN A COMPARATIVE STUDY OF INVESTMENT INCENTIVE REGULATIONS BETWEEN INDONESIA AND VIETNAM

Septira Putri Mulyana

Universitas Mataram

email: septiraputri@unram.ac.id

R. Fahmi Natigor Daulay

Universitas Mataram

email: fahmidaulay@staff.unram.ac.id

Abstrak

Persaingan dalam menarik Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, terutama antara Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), sementara Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, serta perluasan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di kedua negara melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan skema insentif yang beragam, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa perubahan kebijakan, birokrasi berlapis, dan kurangnya kepastian prosedural. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena stabilitas regulasi, mekanisme administrasi terpusat, dan kepastian dalam pemberian insentif. Perbedaan ini berdampak langsung pada realisasi FDI, di mana Vietnam secara konsisten mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dalam satu dekade terakhir. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan konsolidasi kelembagaan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan efektivitas fasilitas investasi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di Indonesia dibanding Vietnam, dan upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi.

Kata Kunci: *Efektivitas insentif; Fasilitas investasi; Kepastian hukum.*

Abstract

Competition to attract Foreign Direct Investment (FDI) in Southeast Asia is intensifying, particularly between Indonesia and Vietnam, the two countries with the highest economic growth in ASEAN. Indonesia has introduced regulatory reforms through the Job Creation Law and a risk-based licensing system (OSS-RBA), while Vietnam has maintained a competitive investment regime through simplified procedures, consistent policies, and expanded



fiscal and non-fiscal incentives. This study aims to analyze the level of legal certainty and the effectiveness of investment facilities in both countries through a normative juridical approach and comparative law methods. The results show that although Indonesia offers a variety of incentive schemes, their implementation often faces obstacles in the form of policy changes, layered bureaucracy, and a lack of procedural certainty. In contrast, Vietnam demonstrates greater effectiveness due to regulatory stability, centralized administrative mechanisms, and certainty in the provision of incentives. This difference has a direct impact on FDI realization, with Vietnam consistently recording higher growth over the past decade. This study concludes that Indonesia needs to simplify regulations, strengthen legal certainty, and consolidate investment institutions to improve global competitiveness and the effectiveness of investment facilities. Thus, this study formulates two main questions: how does the level of legal certainty and the effectiveness of investment facilities in Indonesia compare to Vietnam, and what efforts can Indonesia make to improve the effectiveness of investment facilities by strengthening legal certainty and implementation procedures.

Keyword: *Effectiveness of incentives; Investment facilities; Legal certainty.*

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, serta mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kompetisi global yang semakin ketat, negara-negara berkembang berlomba menyediakan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal untuk menciptakan iklim usaha yang menarik dan kompetitif.¹ Persaingan ini semakin intens seiring perubahan struktur ekonomi global, terutama setelah pandemi COVID-19 dan perubahan rantai pasok internasional yang mendorong investor untuk mencari lokasi produksi yang stabil, efisien, dan memiliki kepastian hukum tinggi. Insentif investasi yang dirancang secara efektif dan diimplementasikan dengan kepastian hukum diyakini mampu menjadi faktor determinan dalam keputusan investor untuk menanamkan modal pada suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan insentif yang menarik harus dibarengi dengan regulasi yang konsisten, prosedur birokrasi yang sederhana, serta kepastian administrasi yang dapat diprediksi, sehingga investor memperoleh keyakinan bahwa fasilitas yang dijanjikan negara benar-benar dapat direalisasikan dalam praktik. Dengan demikian, kombinasi antara insentif yang kompetitif dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam membangun daya saing investasi suatu negara.

Meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, realisasi FDI Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam dalam satu dekade terakhir. Data *ASEAN Investment Report* menunjukkan bahwa Vietnam secara konsisten mampu menarik FDI dalam jumlah yang lebih tinggi, terutama pada sektor manufaktur, elektronik, dan industri berbasis ekspor.² Sementara itu, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural seperti proses perizinan yang panjang, iklim birokrasi yang belum stabil,

1 Alessandra Celani, "Building an Investment Tax Incentives Database : Methodology and Initial Findings for 36 Developing Countries Building an Investment Tax Incentives Database," 2022.

2 Asian Development Bank et al., "ASEAN Investment Report 2022 Pandemic Recovery and Investment Facilitation," *ASEAN Secretariat and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, no. December (2022): 10–40, www.adb.org/ar2022/digital.

dan ketidakpastian regulasi yang dapat memengaruhi persepsi risiko investor.⁵ Fenomena ini menegaskan bahwa ketersediaan insentif saja tidak cukup tanpa dukungan kepastian hukum dan implementasi kebijakan yang konsisten.

Permasalahan utama dalam iklim investasi Indonesia adalah aspek kepastian hukum. Investor menuntut adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha, karena keberadaan norma hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi merupakan acuan fundamental bagi mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakan aktivitas investasi. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah suatu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.³ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang cepat, disharmoni antarperaturan, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah menjadi hambatan mendasar dalam menciptakan iklim usaha yang prediktif. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), implementasinya menghadapi kendala birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Kurangnya stabilitas hukum ini berdampak pada rendahnya efektivitas fasilitas investasi yang seharusnya menjadi daya tarik utama bagi investor asing.

Di sisi lain, Vietnam dipandang sebagai model negara ASEAN yang berhasil menciptakan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, dan stabilitas regulasi dalam jangka panjang. Vietnam tidak hanya menawarkan insentif fiskal yang agresif seperti *tax holiday* jangka panjang, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang tinggi melalui aturan yang relatif stabil dan administrasi investasi yang terpusat. Keberhasilan Vietnam dalam menarik FDI secara masif, termasuk relokasi pabrik dari Tiongkok setelah perang dagang AS dengan Tiongkok, semakin mempertegas bahwa kombinasi antara insentif yang efektif dan kepastian hukum yang kuat merupakan faktor utama kesuksesan negara tersebut.⁴

Dengan latar belakang tersebut, analisis komparatif antara Indonesia dan Vietnam menjadi penting untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam pengaturan insentif investasi, tingkat kepastian hukum, serta efektivitas implementasinya. Pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis faktor-faktor regulatif, administratif, dan kelembagaan yang memengaruhi keputusan investor asing, serta memahami praktik terbaik yang diterapkan oleh Vietnam dalam menarik FDI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi yang perlu dilakukan Indonesia untuk meningkatkan daya saing investasi, memperkuat kepastian hukum, dan menyempurnakan implementasi fasilitas investasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan akademisi untuk

3 Hernawati Ras and Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law" 4, no. 1 (2020): 392–408.

4 Economy Analytics, "Lower Middle Income," *The Little Data Book on Private Sector Development 2012*, 2012, 12–12, https://doi.org/10.1596/9780821389959_lower_middle_income.

merancang kebijakan investasi yang lebih efektif, prediktif, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat lebih kompetitif dalam menarik investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji, yaitu: (1) bagaimana pengaturan fasilitas dan insentif investasi serta tingkat kepastian hukum dalam penerapannya di Indonesia dan Vietnam; (2) dan sejauh mana efektivitas fasilitas investasi Indonesia dibandingkan Vietnam dalam menarik Penanaman Modal Asing (FDI), dan faktor apa yang membuat Vietnam lebih kompetitif.

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Kajian hukum normatif dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur fasilitas serta insentif investasi di Indonesia dan Vietnam. Untuk itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta *Law on Investment 2020* dan peraturan insentif sektor prioritas di Vietnam. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif (*comparative approach*) guna membandingkan model pemberian insentif investasi kedua negara dan menilai sejauh mana efektivitas, kesederhanaan prosedur, dan kepastian hukumnya berpengaruh terhadap daya tarik investasi, khususnya dalam penarikan Penanaman Modal Asing (FDI). Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer (undang-undang dan regulasi), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan OECD, UNCTAD, dan World Bank mengenai iklim investasi), serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif untuk memberikan penafsiran mendalam terhadap kelebihan dan kelemahan rezim insentif investasi masing-masing negara. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepastian hukum dan efektivitas kebijakan insentif investasi Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi yang relevan berdasarkan praktik terbaik yang diterapkan Vietnam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum dalam Pengaturan Insentif Investasi di Indonesia dan Vietnam.

Kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam teori hukum investasi, kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana investor dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta : Kencana, 2017).

tindakan, termasuk stabilitas regulasi, konsistensi penegakan, dan transparansi prosedur administratif.⁶ Investor asing, khususnya dalam proyek jangka panjang seperti manufaktur dan infrastruktur, sangat sensitif terhadap risiko regulasi karena perubahan kebijakan yang mendadak dapat meningkatkan biaya transaksi, risiko operasional, dan ketidakpastian pengembalian modal. Oleh karena itu, kualitas regulasi insentif investasi menjadi faktor penentu daya tarik suatu negara dalam persaingan global FDI. Dalam konteks kompetisi antarnegara yang semakin intensif, tingkat kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan investor, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas negara dalam menjamin keberlanjutan dan stabilitas kebijakan investasi jangka panjang, sehingga perannya menjadi semakin strategis dalam menentukan arus modal internasional.

Insentif investasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta disederhanakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Secara harfiah, Indonesia menyediakan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal yang relatif komprehensif dibanding negara kawasan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan terletak pada substansi insentifnya, melainkan pada ketidakstabilan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, terutama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sekarang menjadi Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.⁷ Perubahan peraturan pajak, aturan turunan UU Cipta Kerja, dan revisi berkali-kali terhadap kebijakan *tax holiday* menyebabkan investor sulit memprediksi jangka waktu dan manfaat insentif yang akan diterima. World Bank mencatat bahwa salah satu hambatan FDI Indonesia adalah *regulatory unpredictability*, termasuk seringnya perubahan kebijakan investasi dalam rentang waktu pendek. *Regulatory unpredictability* yang dimaksud adalah kepastian hukum tidak hanya melindungi investor dari risiko regulasi, tetapi juga mencerminkan kredibilitas negara dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kebijakan investasi, sehingga menjadi faktor kunci dalam menarik arus modal asing.

Selain itu, implementasi kebijakan insentif di Indonesia masih menghadapi tantangan prosedural. Proses pengajuan insentif sering kali memakan waktu panjang karena birokrasi berlapis, kurangnya koordinasi antar instansi, serta variasi interpretasi aturan pada level pelaksana. Pada kajian akademik juga menunjukkan adanya *implementation gap*, yakni ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Akibatnya, meskipun Indonesia menawarkan insentif yang kompetitif, investor menilai risiko administrasi dan regulasi cukup tinggi, sehingga menurunkan efektivitas insentif itu sendiri. Sebaliknya, Vietnam menampilkan karakteristik sistem hukum yang relatif stabil dan terpusat dalam pengaturan insentif investasi. *Law on Investment 2020* Vietnam memuat daftar sektor prioritas, wilayah ekonomi khusus, serta prosedur pemberian insentif yang disusun secara sistematis dan tidak sering mengalami perubahan. Pemerintah Vietnam secara konsisten menjaga harmonisasi regulasi antara pusat dan provinsi, sehingga meminimalkan risiko tumpang tindih kewenangan. Penegakan kebijakan

6 Peter Mahmud Marzuki.

7 Ahmad Redi, *Hukum Investasi* (Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), 2021).

dilakukan melalui mekanisme *single window* yang mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan kepastian prosedural yang tinggi. Faktor ini dinilai sebagai salah satu kunci keberhasilan Vietnam dalam menarik FDI sektor teknologi tinggi seperti Samsung dan Intel. Vietnam juga memiliki strategi kebijakan jangka panjang yang kuat melalui *Socio-Economic Development Strategy (SEDS)* dan *FDI Attraction Strategy*, yang menunjukkan konsistensi arah kebijakan pemerintah hingga 10–15 tahun ke depan. Konsistensi ini memberi sinyal kuat kepada investor bahwa kebijakan insentif tidak akan berubah secara drastis dalam jangka pendek. Dalam literatur hukum investasi, kepastian kebijakan jangka panjang seperti ini dianggap sebagai bagian dari *regulatory commitment*, yaitu janji negara untuk mempertahankan lingkungan regulatif yang stabil demi menjaga kepercayaan investor.

Dari perbandingan tersebut, jelas terlihat bahwa persoalan utama Indonesia bukan pada ketersediaan insentif, melainkan pada kualitas dan stabilitas regulasi serta efektivitas implementasinya. Sementara itu, keunggulan Vietnam justru terletak pada kepastian regulatif dan kepastian administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam persaingan menarik FDI, keberhasilan suatu negara tidak ditentukan oleh besarnya insentif fiskal semata, tetapi oleh tingkat prediktabilitas dan kredibilitas hukum yang mendasari pemberian insentif tersebut. Dengan demikian, peningkatan kualitas regulasi dan konsistensi implementasi menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing investasinya di kawasan.

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan faktor fundamental yang menentukan efektivitas fasilitas dan insentif investasi. Di Indonesia, meskipun insentif yang ditawarkan cukup komprehensif, ketidakstabilan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan birokrasi yang kompleks menurunkan prediktabilitas bagi investor. Sebaliknya, Vietnam berhasil memadukan kepastian regulasi dengan prosedur administratif yang jelas dan konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan efektivitas kebijakan insentifnya. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dan konsistensi implementasi menjadi prasyarat strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing investasi, menjadikan negara lebih menarik bagi arus Penanaman Modal Asing jangka panjang.

2. Efektivitas Fasilitas Investasi dalam Meningkatkan Daya Tarik FDI: Perbandingan Indonesia dan Vietnam.

Efektivitas fasilitas investasi merupakan indikator penting untuk menilai seberapa besar insentif fiskal maupun nonfiskal yang ditawarkan suatu negara benar-benar dapat menarik modal asing. Di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen kebijakan, termasuk kebijakan fiskal seperti insentif *tax holiday* dan *tax allowance*, serta kemudahan perizinan dan fasilitas kawasan ekonomi melalui reformasi perizinan dan kebijakan insentif investasi. Namun, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa insentif fiskal semata tidak selalu cukup mendorong arus FDI secara signifikan. Misalnya, penelitian pada periode 1981-2020 menemukan bahwa *tax holiday* dan tarif pajak korporasi memiliki dampak terhadap *inflow*

FDI, tetapi pengaruhnya bergantung pada faktor makroekonomi lain seperti pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan stabilitas makroekonomi.⁸

Seperti pada kajian kasus pada industri pionir di Indonesia menemukan bahwa meskipun *tax holiday* diterapkan, realisasi FDI meningkat hanya pada tahun-tahun tertentu (misalnya 2012 dan 2014), dan tidak selalu secara konsisten setiap tahun, menunjukkan bahwa insentif pajak saja tidak menjamin keberhasilan investasi asing.⁹ Kajian lain juga menyatakan bahwa implementasi insentif seperti *tax allowance* antara 2020-2023 menunjukkan realisasi investasi hanya sebagian kecil dari target, sehingga desain dan pelaksanaan kebijakan perlu dikritisi secara mendalam.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa aspek struktural seperti kemudahan izin, infrastruktur, stabilitas regulasi, dan kejelasan prosedur sering kali menjadi faktor penentu bagi pengambilan keputusan investor, bukan semata besaran insentif pajak.¹¹

Di sisi lain, pengalaman negara lain seperti Vietnam menunjukkan bahwa efektivitas fasilitas investasi dapat meningkat bila insentif diimbangi dengan penyederhanaan prosedur administratif dan konsistensi regulatif. Studi terbaru mencatat bahwa reformasi investasi di Vietnam, termasuk penyederhanaan prosedur melalui “*one-stop-shop*” serta paket insentif fiskal dan non-fiskal yang berhasil meningkatkan *inflow* FDI secara signifikan, menarik minat investor asing ke sektor manufaktur dan teknologi. Pemerintah Vietnam juga memberikan insentif berupa tarif *Corporate Income Tax* (CIT) yang menurun dan *tax holiday* untuk proyek di sektor prioritas dan kawasan tertentu.¹² Efektivitas kombinasi antara insentif dan kemudahan regulasi ini memperkuat argumen bahwa daya tarik FDI lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dan kepastian kebijakan daripada besaran insentif semata.

Tabel 1. Perbandingan Fasilitas Investasi dan Kondisi Regulasi: Indonesia vs Vietnam.

Aspek	Indonesia	Vietnam	Catatan/Dampak terhadap Efektivitas FDI
Jenis Insentif Fiskal	Tax holiday, tax allowance, super deduction R&D, pembebasan bea masuk	Tax holiday untuk sektor prioritas, CIT rendah untuk 15-17 tahun, pembebasan bea masuk untuk proyek strategis	Kedua negara menawarkan insentif fiskal, namun Vietnam lebih fokus pada sektor prioritas dengan durasi jelas

8 Muhammad Ikhsan S. Bella and Ivan Yudianto, “The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: The Case of Tax Holiday and Corporate Income Tax Rates in Indonesia,” *Journal of Accounting Auditing and Business* 4, no. 2 (2021): 34–48, <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i2.34397>.

9 Muhammad Tri Karimullah, “Dampak Kebijakan Tax Holiday Pada Aliran Masuk Fdi Industri Pionir Di Indonesia,” *Bina Ekonomi*, 2020, <https://doi.org/10.26593/be.v22i2.3835.181-198>.

10 Yogi Michael Matondang, “Analisis Kebijakan Tax Allowance Yang Lebih Pro Investasi,” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 7, no. 2 (2024): 185–99, <https://doi.org/10.18196/jati.v7i2.23717>.

11 Yulida R. et al., “Strategy To Increase Foreign Investment in Indonesia: Analysis of Economic Policy and Its Impact,” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7 (6) (2024): 7293–7300.

12 OECD, *OECD Economic Surveys: Viet Nam 2025*, *OECD Economic Surveys*, vol. 2025, 2025, https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-viet-nam-2025_fb37254b-en.html.

Insentif Non-Fiskal	Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudahan perizinan melalui OSS-RBA	One-stop service, akses lahan, dukungan infrastruktur lokal	Vietnam menekankan kepastian prosedur administratif, Indonesia masih menghadapi variasi interpretasi di daerah
Kepastian Regulasi	Sering berubah, tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan pemerintah daerah	Stabil, terpusat, konsisten antara pusat dan provinsi	Kepastian regulasi tinggi meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalkan risiko regulasi
Efektivitas Implementasi	Birokrasi kompleks, koordinasi antar lembaga lemah, realisasi FDI belum optimal	Prosedur cepat, transparan, dan konsisten, inflow FDI meningkat signifikan	Efektivitas insentif lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dan konsistensi regulasi
Hasil Terhadap FDI	Aliran modal cenderung fluktuatif; proyek tertunda	Aliran FDI stabil dan meningkat, terutama sektor manufaktur dan teknologi	Investor menilai Vietnam lebih menarik karena kepastian prosedur dan stabilitas kebijakan
Faktor Penentu Keberhasilan	Besaran insentif belum cukup; perlu dukungan kepastian hukum dan prosedur	Kombinasi insentif fiskal & non-fiskal, kepastian hukum, efisiensi birokrasi	Efektivitas fasilitas investasi lebih bergantung pada sinergi antara insentif dan kepastian hukum

Berdasarkan analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas fasilitas investasi tidak hanya bergantung pada besarnya insentif fiskal dan non-fiskal, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efisiensi prosedur administratif. Di Indonesia, meskipun paket insentif yang diberikan relatif komprehensif, realisasi FDI masih terbatas akibat birokrasi yang kompleks, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan variasi interpretasi aturan di tingkat daerah. Sebaliknya, Vietnam berhasil meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui kombinasi insentif yang jelas dan terstruktur serta prosedur perizinan yang cepat dan konsisten, sehingga investor dapat memproyeksikan risiko dan keuntungan dengan lebih akurat. Tabel perbandingan sebelumnya menunjukkan secara konkret bahwa stabilitas regulasi dan efisiensi administratif menjadi faktor kunci yang membedakan hasil nyata dari paket insentif di kedua negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tarik investasi asing secara berkelanjutan, Indonesia perlu menekankan penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi, sehingga fasilitas investasi yang ada dapat benar-benar efektif dan bersaing di tingkat regional.

Dalam penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi di Indonesia, pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan investasi bersifat stabil, jelas, dan konsisten di semua tingkat pemerintahan, sehingga investor dapat memprediksi risiko dan merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih efektif. Hal ini mencakup harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan birokrasi perizinan, serta penerapan sistem elektronik yang transparan untuk memantau proses persetujuan fasilitas investasi. Contohnya, penyederhanaan prosedur perizinan melalui *One Single Submission* (OSS-RBA) dan standarisasi persyaratan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan investor, sementara regulasi yang tidak berubah-ubah terkait *tax holiday*, *tax allowance*, atau pembebasan bea masuk menjamin kepastian fiskal. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap persyaratan investasi dan transparansi dalam evaluasi proyek investasi dapat meningkatkan kepercayaan investor bahwa fasilitas yang diberikan benar-benar dapat diakses tanpa risiko interpretasi yang berbeda antarinstansi. Dengan demikian, penguatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas insentif, tetapi juga mendorong masuknya FDI secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat regional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif antara Indonesia dan Vietnam, dapat disimpulkan bahwa efektivitas fasilitas investasi dan daya tarik FDI sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta efisiensi prosedur administratif, selain besarnya insentif fiskal maupun non-fiskal yang ditawarkan. Di Indonesia, meskipun paket insentif relatif komprehensif, hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan prosedur di tingkat daerah, serta fluktuasi regulasi menurunkan prediktabilitas dan kepercayaan investor. Sebaliknya, Vietnam berhasil meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui kombinasi insentif yang jelas dan terstruktur, prosedur perizinan yang cepat dan konsisten, serta stabilitas regulasi, sehingga realisasi FDI lebih optimal, khususnya di sektor manufaktur dan teknologi. Analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum dan implementasi prosedur yang efektif menjadi prasyarat strategis bagi negara untuk meningkatkan daya saing investasi secara berkelanjutan, dengan rekomendasi berupa penguatan kepastian hukum melalui regulasi yang stabil dan harmonis antara pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur administratif melalui OSS-RBA dan standarisasi persyaratan di Kawasan Ekonomi Khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mempercepat evaluasi proyek, fokus pada efektivitas implementasi insentif dengan pemantauan berkala agar fasilitas dapat diakses secara adil dan konsisten, serta melakukan benchmark terhadap pengalaman Vietnam dalam mengintegrasikan insentif dan prosedur administratif. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fasilitas investasi, memperkuat kepastian hukum, dan menarik aliran FDI secara lebih stabil serta kompetitif di tingkat regional ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi. *Hukum Investasi*. Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), 2021.
- Analytics, Economy. “Lower Middle Income.” *The Little Data Book on Private Sector Development 2012*, 2012, 12–12. https://doi.org/10.1596/9780821389959_lower_middle_income.
- Asian Development Bank, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ASEAN Secretariat, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Business Organisations, Think Tanks, and Academic Institutions. “ASEAN Investment Report 2022 Pandemic Recovery and Investment Facilitation.” *ASEAN Secretariat and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, no. December (2022): 10–40. www.adb.org/ar2022/digital.
- Bella, Muhammad Ikhsan S., and Ivan Yudianto. “The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: The Case of Tax Holiday and Corporate Income Tax Rates in Indonesia.” *Journal of Accounting Auditing and Business* 4, no. 2 (2021): 34–48. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i2.34397>.
- Celani, Alessandra. “Building an Investment Tax Incentives Database : Methodology and Initial Findings for 36 Developing Countries Building an Investment Tax Incentives Database,” 2022.
- Karimullah, Muhammad Tri. “Dampak Kebijakan Tax Holiday Pada Aliran Masuk Fdi Industri Pionir Di Indonesia.” *Bina Ekonomi*, 2020. <https://doi.org/10.26593/be.v22i2.3835.181-198>.
- Matondang, Yogi Michael. “Analisis Kebijakan Tax Allowance Yang Lebih Pro Investasi.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 7, no. 2 (2024): 185–99. <https://doi.org/10.18196/jati.v7i2.23717>.
- OECD. *OECD Economic Surveys: Viet Nam 2025*. *OECD Economic Surveys*. Vol. 2025, 2025. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-viet-nam-2025_fb37254b-en.html.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta : Kencana, 2017.
- Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law” 4, no. 1 (2020): 392–408.
- Yulida R., Rozikin K., Sumarsih S., Rahmadani M., Rozali M., and Nursantu W. “Strategy To Increase Foreign Investment in Indonesia: Analysis of Economic Policy and Its Impact.” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7 (6) (2024): 7293–7300.